

PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG KARANG

Putri Rahayu¹, Eko Budi Sulistio²

^{1,2}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
kartikamarini@rocketmail.com

Abstrak

Masalah gender kini telah menjadi komitmen regional, nasional, dan internasional. Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender, menekankan pentingnya pengarusutamaan gender untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Karyawan adalah aset penting di Kantor Layanan Pajak mana pun, karena perkembangan lembaga yang semakin meningkat bergantung pada kinerja para pejabatnya. Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu organisasi di bawah naungan Kementerian Keuangan juga turut serta dalam mendukung PUG ini, yaitu dengan menerapkan konsep Responsif Gender. Konsep ini juga diterapkan di seluruh organisasi di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak termasuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang. Dalam penelitian ini para peneliti ingin mengetahui apa saja programnya, bagaimana implementasinya dan apa saja faktor yang mendukung dan membatasi dalam Pengarusutamaan Gender di KPP Pratama Tanjung Karang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gender dan teori Keadilan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mengambil data dari 22 informan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat dicapai bahwa pengarusutamaan gender di KPP Pratama Tanjung Karang sudah dapat dilihat dari aspek dukungan politik, kebijakan, kelembagaan, sistem informasi dan sumber daya manusia. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki, yaitu toilet untuk pembayar pajak serta area merokok dan parkir wanita harus dihilangkan.

Kata kunci: Pengarusutamaan Gender, Kesetaraan, Keadilan

Abstract

Gender issues have now become regional commitment, nationally, and internationally. Presidential Instruction No. 9 of 2000 on gender mainstreaming, pressed the importance of mainstreaming gender in order to realize a good governance. Employees are an important asset at any Tax Services Office, due to the growing development of the agencies depend on the performance of its officers. Directorate General of Taxes as one of the organizations under the auspices of the Ministry of Finance also participate in this support PUG, namely by applying the concept of Gender Responsive. This concept is also applied throughout the organization under the auspices of the Directorate General of taxation including Tax Services Office Pratama Tanjung Karang. In this study the researchers wanted to know what are the programs, how the implementation and what are the factors supporting and restricting in Mainstreaming Gender in the KPP Pratama Tanjung Karang. The theory used in this study is gender theory and the theory of Justice. This research is a descriptive research with qualitative approach by taking data from 22 informant through interviews, observation and the documentation. From this research it is achieved that mainstreaming gender in KPP Pratama Tanjung Karang already can be seen from the aspects of political support, policy, institutional, information systems and human resources. But there are some things that should be fixed, namely toilet for taxpayers as well as a smoking area and a woman parking should be eliminated.

Keyword : Gender Mainstreaming, Equality, Justice

I. PENDAHULUAN

Isu Gender kini telah menjadi komitmen daerah, nasional, dan internasional. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) telah mengalami kemajuan dengan terbentuknya kelembagaan PUG di sebagian besar kementerian/lembaga. Pembangunan dengan paradigma baru yang menjadikan manusia sebagai pusat perhatiannya, memerlukan strategi Pengarusutamaan Gender. Intruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender, menekankan pentingnya pengarusutamaan gender untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengarusutamaan Gender merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap rakyat, agar dapat memperoleh manfaat dari berbagai kebijakan, program, kegiatan yang dibuatnya untuk menyumbang kemajuan sosial, ekonomi, politik, dan budaya daerah yang melaksanakannya.

Pemerintah mulai menyadari bahwa perempuan yang jumlahnya lebih dari 50 % dari penduduk Indonesia adalah sebuah potensi pembangunan yang telah disia-siakan. Kemajuan perempuan dan kesetaraan gender adalah hak asasi manusia. Keadilan dan kesetaraan gender dapat dicapai melalui perencanaan yang baik dan kerjasama antara perempuan dan laki-laki. Keadilan gender adalah suatu perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Perlakuan yang adil bukan berarti keduanya diperlakukan sama, karena laki-laki dan perempuan dalam keadaan tidak sama. Masalah, kebutuhan, dan kepentingan antarapemahaman dan laki-laki tidak dapat disamakan.

Kesetaraan gender bukan tujuan pembangunan, tetapi prasyarat bagi tercapainya tujuan pembangunan manusia yang adil, menyeluruh dan berkelanjutan (WSP II, 2000 dalam Sri Mastuti, et.al 2007:15). Tujuan pengarusutamaan gender adalah mengubah kebijakan lembaga-lembaga/ organisasi-organisasi menjadi lembaga/ organisasi dengan struktur dan sistemnya yang responsif gender (Sri Mastuti, et.al 2007:16-19).

Kegagalan untuk merealisasikan potensi separuh penduduk berarti kerugian bagi pembangunan itu sendiri, dengan demikian pentingnya mengatasi isu kesenjangan gender

bukan saja terkait dengan masalah hak asasi manusia dan keadilan, tetapi juga masalah efektifitas dan efisiensi dalam pembangunan. Dapat kita lihat bahwa IKG (Indeks Ketimpangan Gender) Provinsi Lampung Tahun 2016 melebihi IKG.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat provinsi, kondisi ketimpangan gender sangat bervariasi. Dalam kurun waktu 2015-2016, disparitas antarwilayah cenderung menurun. Di tahun 2015, IKG provinsi berkisar antara 0,574 hingga 0,110. Sedangkan pada tahun 2016 berada pada posisi 0,558 hingga 0,212. Hal ini berarti terjadi penurunan disparitas jika diukur menurut rentang (range). Rentang IKG tahun 2016 berada pada angka 0,346, sedangkan sebelumnya berada pada angka 0,466. Propinsi Lampung memiliki IKG yang tinggi melebihi rata-rata, sehingga dapat disimpulkan bahwa Propinsi Lampung mengalami kerugian/kegagalan pencapaian pembangunan akibat adanya ketidaksetaraan gender.

Perbandingan antara Laki-Laki dan Perempuan pada tahun 2014 (91,30/91,69), tahun 2015 (92,86/93,24) dan tahun 2016 (94,37/94,72). Berdasarkan proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010-2016, *sex ratio* pada tahun 2015 dan 2016 mencapai 101, artinya komposisi penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama.

Kantor Pelayanan Pajak (Pratama) sebagai salah satu unit yang menjalankan program Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pegawai merupakan aset penting pada setiap kantor Pelayanan Pajak, karena tumbuh berkembangnya instansi tersebut bergantung pada kinerja para pegawainya, serta pelaksanaan tugas masing-masing bagian secara maksimal dan profesional serta kerjasama yang baik dalam setiap bagian yang ada. KPP Pratama Tanjung Karang memiliki 92 pegawai yang mendukung kinerja. 61 pegawai pria dan 31 pegawai wanita. Dengan adanya data ini maka dapat disimpulkan bahwa di dalam organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tanjung Karang, pegawai wanita menjadi minoritas. Meskipun menjadi minoritas, pegawai wanita memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan pegawai pria di setiap organisasi dibawah naungan Kementerian Keuangan (Sub Bagian Umum KPP Pratama Tanjung Karang, 2019).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah program di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung telah responsif gender atau belum, sehingga kajian ilmiah dalam penelitian ini berisi tentang: Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Masyhuri dan Zainuddin (2008:20) penelitian kualitatif adalah penelitian yang memecahkan masalah dengan menggunakan data empiris.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung dilihat dari: (a) Program-Program Terkait PUG di KPP Pratama Tanjung Karang, (b) Pelaksanaan Program-Program PUG di KPP Pratama Tanjung Karang, (c) Faktor Pendukung dan Penghambat dalam PUG di KPP Pratama Tanjung Karang

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*), yang dilakukan di Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung sebagai Kantor yang menaungi KPP Pratama dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung karena memiliki pegawai perempuan paling sedikit serta pegawai laki-laki paling banyak diantara KPP yang ada di Bandar Lampung namun telah menerapkan program pengarusutamaan gender dengan baik dan merupakan KPP pertama di Bandar Lampung.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melalui tiga metode, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari arsip-arsip mengenai program responsif gender di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Tanjung Karang yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.01/2018, Nota Dinas Nomor ND-310/WPJ.28/KP.03/2018, Nota Dinas Nomor ND-150/WPJ.28/KP.03/2018, Nota Dinas Nomor ND-371/WPJ.28/KP.03/2018, Sejarah, Visi-Misi, Azas, Tujuan, Data Persebaran

Pegawai, Struktur Organisasi, Data Kepegawaian dan Wilayah Kerja lokasi penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Provinsi Lampung berdiri pada tahun 1963 dengan status Dinas Luar Tingkat 1 Teluk Betung sedangkan Kantor Inspeksi Keuangan berkedudukan di Palembang jadi Kantor Dinas Luar Tingkat 1 Teluk Betung merupakan Kantor yang ada di bawah Kantor Inspeksi Keuangan Palembang. Kantor Dinas Luar Tingkat 1 Teluk Betung tahun 1964 ditingkatkan status menjadi Kantor Inspeksi Keuangan Teluk Betung karena karisidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung. Di samping ekonominya sudah meningkat untuk hadirnya sebuah kantor dalam mengelola penerimaan pajak. Kantor Inspeksi Keuangan Teluk Betung Dengan adanya reorganisasi Direktorat Jendral Pajak diganti menjadi Kantor Inspeksi Pajak Teluk Betung Pada tahun 1969. Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 276/1989 diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandar Lampung Tepatnya pada tanggal 1 April 1989 dan pada tanggal 9 September 2008 sesuai dengan keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-159/PJ/2008 diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang. KPP Tanjung Karang kemudian dipecah kembali menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang diantaranya: KPP Pratama Tanjung Karang, KPP Pratama Kedaton, KPP Pratama Natar, dan KPP Pratama Teluk Betung.

Program-Program PUG

Program Cuti Melahirkan dan Cuti Menemani Melahirkan

Program cuti melahirkan dan cuti menemani melahirkan yang ada di KPP Pratama Tanjung Karang merupakan hak pegawai yang dapat diambil ketika ingin melahirkan dan menemani melahirkan. Untuk cuti melahirkan selama tiga bulan sejak tanggal cuti dibuat sedangkan untuk cuti menemani melahirkan berlaku selama

sepuluh hari dari tanggal yang diajukan. Berdasarkan dokumentasi PMK No.93PMK012018 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan No. 214/PMK.01/2011 tentang penegakkan disiplin dalam kaitannya dengan tunjangan khusus pembinaan keuangan negada di lingkungan kementerian keuangan. Pada PMK ini sudah dijelaskan tentang rencana strategis dan rencana kerja tentang pengarusutamaan gender ini. Pasal 11 huruf f dan Pasal 12 Ayat 1 huruf b menjelaskan tentang cuti melahirkan. Pasal 12 Ayat 2 huruf b menyatakan tentang cuti mendampingi melahirkan dan Pasal 12 Ayat 3 huruf d tentang gugur kandungan.

Konsep dalam gender terbagi menjadi 2, yaitu: konsep *nature* dan konsep *nurture*. Secara etimologi *nature* diartikan sebagai karakteristik yang melekat atau keadaan bawaan pada seseorang atau sifat dasar manusia. Secara etimologi *nurture* berarti kegiatan perawatan atau pemeliharaan, pelatihan, serta akumulasi dari faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kebiasaan dan ciri-ciri yang nampak. *Nurture* dapat diartikan sebagai suatu faktor kepribadian tentang kekuatan lingkungan yang mengatur perkembangan manusia. Jika teori dikaitkan dengan program cuti melahirkan dapat kita ketahui bahwa melahirkan merupakan sifat alamiah yaitu *nature* setiap perempuan sedangkan menemani melahirkan merupakan sifat *nurture* setiap laki-laki. Kebiasaan dilingkungan bahwa suami menemani istrinya melahirkan telah terpenuhi di KPP Pratama Tanjung Karang. Hak-hak para pegawai akan kebutuhan gender *nature* dan *nurture* pun tercapai.

Program Kesetaraan

Program kesetaraan terbagi atas kesetaraan pelayanan dan kesetaraan kesempatan. Program kesetaraan pelayanan yang ada di KPP Pratama Tanjung Karang merupakan pemberian pelayanan yang sama terhadap Wajib Pajak (WP) tanpa membedakan bagi perempuan maupun laki-laki. Walaupun tidak dibedakan namun dalam program ini memiliki prioritas yang harus diutamakan yaitu untuk ibu hamil, lansia dan difabel. Program kesetaraan kesempatan ditujukan untuk pegawai karena mereka

berhak mendapat kesetaraan kesempatan dalam berkarir dan mengisi suatu jabatan.

Dokumentasi untuk Program kesetaraan pelayanan dimuat dalam Nota Dinas Nomor ND-371/WPJ.28/KP.03/2018 pada poin 3 huruf b. Dokumentasi dalam hal kesetaraan kesempatan bagi pegawai dimuat dalam Nota Dinas Nomor ND-310/WPJ.28/ KP.03/2018 poin 2 huruf a. Berdasarkan wawancara dan dokumentasi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kesetaraan kesempatan bagi pegawai sudah diatur dalam Nota Dinas Nomor ND-310/WPJ.28/ KP.03/2018 poin 2 huruf a. Dengan demikian pegawai sudah dengan jelas dapat berkarir sesuai kemampuannya dan tidak dibatasi tanpa melihat apakah dia perempuan ataupun laki-laki, selama mereka mampu maka mereka bisa mendapatkan jabatan tersebut.

Internalisasi Corporate Value and Inhouse Training

Internalisasi Corporate Value and Inhouse Training yang ada di KPP Pratama Tanjung Karang adalah pemberian pengetahuan, *skill* dan kompetensi. *Internalisasi Corporate Value and Inhouse Training* yang ada antara lain pelatihan bahasa inggris, kuliah umum perpajakan, kampanye simpatik, *coffee morning*, pelatihan *make up* dan pengajian. Hal ini diperuntukan agar pegawai dapat memperdalam ilmu baik dalam pengetahuan baik terkait pekerjaan maupun pengembangan diri. Dalam dokumentasi Nota Dinas No. ND-371/WPJ.28/KP.03/2018 poin ke 5 menyatakan bahwa telah diadakan pengembangan pegawai berupa *Internalisasi Corporate Value and Inhouse Training*.

Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung adalah fasilitas yang disediakan oleh KPP Pratama Tanjung Karang untuk digunakan oleh wajib pajak dan pegawai. Fasilitas yang disediakan untuk wajib pajak antara lain ruang laktasi, parkir wanita, area merokok, area bermain anak, toilet dan loket khusus sedangkan fasilitas untuk pegawai adalah parkir wanita dan toilet terpisah. Fasilitas ini disediakan untuk mempermudah mereka dalam hal pemenuhan kebutuhan saat berada di KPP Pratama Tanjung Karang.

Anggaran Pengarusutamaan Gender

Anggaran pengarusutamaan gender adalah anggaran yang dialokasikan dalam penyelenggaraan kegiatan pengarusutamaan gender. Anggaran untuk pengarusutamaan gender haruslah responsif gender dalam pengalokasiannya. Anggaran tersebut juga digunakan untuk membangun fasilitas terkait PUG dan anggaran pengembangan pegawai berupa *Internalisasi Corporate Value and Inhouse Training*.

Pelaksanaan Program PUG

Program Cuti Melahirkan dan Cuti Menemani Melahirkan

Pelaksanaan dari program cuti melahirkan dan cuti menemani melahirkan berkisar selama tiga bulan untuk perempuan dan 10 hari untuk laki-laki. Hal ini dikarenakan memang perempuan lebih membutuhkan waktu untuk pemulihan dan peran laki-laki untuk mendampingi melahirkan dan memberikan dukungan moralitas kepada istrinya yang akan melahirkan. Selama tahun 2018 terdapat 4 pegawai yang mengajukan cuti melahirkan dan 2 pegawai yang mengajukan cuti menemani melahirkan.

Program Kesetaraan

Pelaksanaan program kesetaraan pelayanan dan program kesetaraan kesempatan dapat dilihat dari keseharian pegawai dan wajib pajak di KPP Pratama Tanjung Karang. Untuk program kesetaraan pelayanan yang diperuntukan untuk wajib pajak langsung dapat dirasakan ketika telah memasuki kantor.

Fasilitas Pendukung

Pelaksanaan fasilitas pendukung di KPP Pratama Tanjung Karang dapat dinikmati oleh wajib pajak yang memerlukannya. Berdasarkan hasil observasi tentang fasilitas yang mendukung pengarusutamaan gender, peneliti mewawancarai pengguna fasilitas yang tersedia mulai dari ruang laktasi, area bermain anak, parkir wanita, toilet, area merokok dan loket khusus (Lansia, Ibu Hamil, Difabel).

Ruang laktasi yang tersedia di KPP Pratama Tanjung Karang berada di sudut kiri pintu masuk tempat pelayanan. Didalamnya terdapat dua buah sofa dan dua buah bantal disetiap kursinya. Diatas ruang laktasi

terdapat *Air Conditioner* (AC) untuk membuat para ibu yang sedang menyusui merasa nyaman. Lantainya dialaskan karpet merah dan terdapat jendela yang langsung menghadap keluar dan ditutupi oleh tirai plastik yang bisa ditarik agar sewaktu tidak digunakan tempat tersebut mendapatkan cahaya matahari sehingga tidak lembab. Pintu ruangan ini terdapat kunci, jadi ketika ada ibu yang menggunakannya, pintu bisa dikunci dari dalam.

Area Bermain Anak di KPP Pratama Tanjung Karang terletak di kiri saat memasuki pintu masuk sebelah ruang laktasi. Area bermain anak ini diperuntukan bagi anak yang dibawah lima tahun (balita). Area ini dikelilingi oleh enam pagar warna warni dan didalamnya terdapat satu buah perosotan kecil yang disebelahnya menempel *ring* basket, satu buah bola basket, satu buah boneka sapi dari plastik, satu wadah bongkar pasang, dua buah mobilan dan dua buah bongkar pasang susun. Mainan tersebut difasilitasi untuk membantu para bapak dan ibu yang membawa anak ke kantor. Saat anak sedang bermain orang tuanyalah yang harus memantau anaknya dari kursi yang terdapat didekat area bermain anak tersebut.

Parkir Wanita di KPP Pratama Tanjung Karang terdapat di halaman kantor pelayanan sebelah kiri untuk kendaraan roda dua dan untuk roda empat berada di kantor atas, untuk parkir motor laki-laki berada di halaman kantor pelayanan didelakang parkir wanita dan untuk parkir mobil laki-laki berada dikantor atas berhadapan dengan parkir mobil wanita. Parkir ini diprioritaskan untuk wanita namun karena lebih banyak wajib pajak laki-laki yang berkepentingan maka parkir wanita ini fleksibel dalam artian bisa digunakan juga untuk laki-laki.

Toilet yang ada di KPP Pratama Tanjung Karang berada diluar ruangan kantor pelayanan. Jika seseorang ingin memasuki toilet maka harus melewati jalan lurus disebelah kiri tempat pelayanan dan tidak jauh dari situ terdapat dua buah toilet disebelah kanannya. Toilet tersebut tidak ada penanda mana yang untuk laki-laki dan mana yang untuk perempuan. didalamnya terdapat satu buah ember, satu buah gayung, kloset jongkok, keran untuk menghidupkan air dan pegangan dari besi untuk membantu jika susah untuk berdiri sehabis buang air.

Area merokok yang ada di KPP Pratama Tanjung Karang yang sebelumnya tidak disebutkan dalam Nota Dinas No-310/WPJ-28/KP.03/2018 penulis temukan dalam melakukan observasi. Hal ini dikarenakan banyaknya wajib pajak yang juga seorang perokok datang ke kantor. Maka dari itu menurut Nota Dinas Nomor ND-371/WPJ.28/KP.03/2018 pada poin ke 3 huruf b dinyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan laki-laki dibuatkan pojok area merokok. Dikatakan pojok area merokok karena memang letaknya diluar kantor pelayanan dipojok kanan dengan terdapat satu asbak rokok, satu tong sampah, dua buah kursi beserta dua buah meja dan pinggirnya juga terdapat tempat duduk keramik. Diatasnya terdapat tulisan area merokok diikuti simbol rokok yang berasap.

Loket khusus yang ada di KPP Pratama Tanjung Karang adalah loket yang diperuntukan bagi ibu hamil, lansia dan difabel. Loket ini berada didepan pintu masuk kantor pelayanan. Ketika ada ibu hamil, lansia ataupun difabel maka secara otomatis mereka bisa langsung dilayani dan tidak perlu mengantri. Hal ini demi terciptanya pelayanan prima.

Internalisasi Corporate Value and Inhouse Training

Dalam pelaksanaannya *Internalisasi Corporate Value and Inhouse Training* sudah sesuai sebagaimana pengarusutamaan gender karena kebutuhan para pegawai tercapai dengan adanya pengembangan diri dan pengetahuan yang disediakan oleh kantor dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di KPP Pratama Tanjung Karang. Kegiatan dari program ini adalah pelatihan bahasa inggris bagi pegawai untuk meningkatkan kemampuan bahasa inggris, kuliah umum perpajakan untuk menambah pengetahuan pegawai sesuai dengan bidang yang sedang mereka tekuni yaitu perpajakan, kampanye simpatik yang dilakukan oleh pegawai ketika mempunyai program baru ini adalah cara untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, *coffe morning* yaitu saat untuk berdiskusi tentang hambatan yang terjadi dan dilakukan dalam 1 bulan 1 kali, pelatihan *make up* untuk perempuan karena kebutuhannya untuk merawat diri serta

menjaga penampilan dan pengajian terpisah untuk laki-laki dan perempuan.

Anggaran Pengarusutamaan Gender

Pelaksanaan anggaran Pengarusutamaan Gender ada disetiap kegiatan yang yang menyangkut pengarusutamaan gender. Anggaran ini telah dirincikan setiap pelaksanaan suatu kegiatan dan pemenuhan fasilitas yang melingkupi pengarusutamaan gender. Namun pada penelitian ini peneliti kesulitan untuk mendapatkan rincian alokasi anggaran tersebut sehingga peneliti hanya memaparkan dan tidak dapat mengetahui besarnya anggaran serta perinciannya.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam PUG di KPP Pratama Tanjung Karang

Faktor Pendukung:

Merupakan faktor-faktor yang mendukung pengarusutamaan gender di KPP Pratama Tanjung Karang. Faktor tersebut antara lain:

1. Aspek Dukungan Politik

Aspek Dukungan Politik, merupakan dukungan politik dari pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap pelaksanaan PUG.

2. Aspek Dukungan Kebijakan

Aspek Dukungan Kebijakan, merupakan dukungan politik yang ada pada kebijakan/program/kegiatan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang.

3. Aspek Dukungan Informasi

Aspek dukungan informasi merupakan ketersediaan informasi tentang pengarusutamaan gender yang ada di KPP Pratama Tanjung Karang.

4. Aspek Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek sumber daya manusia adalah pengetahuan para pegawai untuk ikut serta dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di KPP Pratama Tanjung Karang.

5. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan adalah unit yang menangani seputar pengarusutamaan gender di KPP Pratama Tanjung Karang.

Faktor Penghambat

Merupakan faktor yang menghambat terlaksananya program pengarusutamaan gender di KPP Pratama Tanjung Karang. Faktor tersebut antara lain:

1. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender yang ada di lingkungan KPP Pratama Tanjung Karang masih rendah. Banyak wajib pajak yang malu menggunakannya walaupun sebenarnya sudah tersedia dan dia mengetahuinya. Setelah dilakukan hasil pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender di KPP Pratama Tanjung Karang pada Nota Dinas Nomor ND-371/WPJ.28/KP.03.2018 pada poin ke 6 disampaikan bahwa kendalanya terdapat pada kesadaran masyarakat yang masih rendah.

2. Fasilitas

Fasilitas yang disediakan oleh KPP Pratama Tanjung Karang sudah cukup baik dilihat dari pengadaan dan pelaksanaannya, namun terdapat beberapa fasilitas yang kurang sesuai dengan pengarusutamaan gender. Fasilitas yang kurang sesuai itu adalah parkir wanita, toilet dan area merokok sebagaimana berikut:

3. Parkir Wanita

Parkir Wanita adalah tempat parkir yang khusus disediakan untuk perempuan. Dalam pelaksanaannya parkir tersebut tidak wajib digunakan untuk perempuan namun laki-laki juga dapat menggunakannya. Dari observasi peneliti didapatkan bahwa yang menggunakan parkir itu siapa saja baik laki-laki maupun perempuan tanpa dibedakan. Hal ini dikarenakan begitu ada wajib pajak yang masuk maka kendaraan roda duanya akan langsung diparkirkan dibantu oleh satpam yang menjaga. Sebenarnya hal ini baik karena tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan karena yang diparkirkan hanya kendaraannya bukan orangnya. Namun karena parkir wanita telah dicantumkan ke dalam nota dinas, sebaiknya ditetapkan sebagaimana mestinya atau jika ingin dihapuskan dapat diperbarui dengan didukung kebijakan baru di nota dinas selanjutnya.

4. Toilet

Toilet yang disediakan untuk wajib pajak tercantum dalam nota dinas. Dalam pelaksanaannya toilet belum mendukung dengan pengarusutamaan gender. toilet yang disediakan untuk wajib pajak hanya seperti

toilet pada umumnya. Terdapat dua toilet yang diakses dari luar untuk wajib pajak namun tidak ada penanda untuk laki-laki atau perempuan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan pengarusutamaan gender dimana seharusnya toilet laki-laki dan perempuan dipisahkan dan difasilitasi sesuai kebutuhan masing-masing, dengan dicantumkannya toilet kedalam fasilitas pengarusutamaan gender maka seharusnya toiletnya pun harus responsif gender.

5. Area Merokok

Area merokok yang disediakan oleh KPP Pratama Tanjung Karang sesuai nota dinas yang ada sebaiknya diganti dengan area dilarang merokok. Merokok bukanlah sebuah kebutuhan namun sebuah kebiasaan sedangkan pengarusutamaan gender adalah pemenuhan kebutuhan. Memfasilitasi perokok merupakan sebuah kesalahan, sebaiknya diganti dengan larangan yang akan dikenakan sanksi bagi yang melanggar sehingga kawasan kantor akan terbebas dari asap rokok.

IV. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian beserta pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa melahirkan merupakan sifat alamiah yaitu *nature* setiap perempuan sedangkan menemani melahirkan merupakan sifat *nurture* setiap laki-laki. Kebiasaan dilingkungan bahwa suami menemani istrinya melahirkan telah terpenuhi di KPP Pratama Tanjung Karang. Hak-hak para pegawai akan kebutuhan gender *nature* dan *nurture* pun tercapai.

Dengan adanya pengarusutamaan gender maka kini laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dan kesempatan yang sama diranah publik dan pendidikan. Keadilan dalam mendapatkan suatu pelayanan juga telah diterapkan sehingga kebutuhan seseorang terpenuhi karena ada pihak-pihak yang harus lebih didahulukan karena mempunyai keterbatasan yaitu lansia, ibu hamil dan difabel.

Internalisasi Corporate Value and Inhouse Training untuk menambah pengetahuan, *skill* dan kompetensi bagi para pegawai di KPP Pratama Tanjung Karang baik terkait pekerjaan maupun pengembangan diri. Hal tersebut penting untuk menambah

kemampuan mereka dalam bekerja maupun bagi individu. Sedangkan Fasilitas yang ada dalam program pengarusutamaan gender di KPP Pratama Tanjung Karang sudah sesuai dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Fasilitas yang disediakan telah memahami bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan memang berbeda dan harus sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian, pelaksanaan pengarusutamaan gender juga harus memiliki anggaran yang juga responsif gender.

Dari sisi pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender, Proses cuti melahirkan dan cuti menemani melahirkan sama saja setelah mengajukan dan disetujui oleh atasan maka otomatis terekam disistem. Perbedaannya terletak pada rentang waktu cuti. Untuk melahirkan selama tiga bulan dan untuk menemani melahirkan selama 10 hari. Pelaksanaan program kesetaraan kesempatan sangat dirasakan manfaatnya bagi para pegawai. Kesempatan berkarir dan memperoleh jabatanpun menjadi terbuka lebar bagi laki-laki maupun perempuan.

Fasilitas yang ada sudah cukup baik karena telah memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan yang berbeda-beda.

Pelaksanaannya Internalisasi Corporate Value and Inhouse Training sudah sesuai sebagaimana pengarusutamaan gender karena kebutuhan para pegawai tercapai dengan adanya pengembangan diri dan pengetahuan yang disediakan oleh kantor dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di KPP Pratama Tanjung Karang.

Pelaksanaan anggaran Pengarusutamaan Gender ada disetiap kegiatan yang menyangkut pengarusutamaan gender. Anggaran ini telah dirincikan setiap pelaksanaan suatu kegiatan dan pemenuhan fasilitas yang melingkupi pengarusutamaan gender.

Sedangkan faktor pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender adalah:

1. Pengarusutamaan gender bukan hanya soal jenis kelamin, tetapi soal pemenuhan kebutuhan. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) sudah dimasukkan kedalam PMK No.93/PMK.01/2018.
2. Kebijakan tentang pengarusutamaan gender yang diterapkan sudah baik

dilihat dari kebijakan serta sarana yang disediakan. Fasilitas yang disediakan guna memenuhi kebutuhan praktis internal maupun eksternal. Untuk rencana 5 tahunan langsung dibuat dipusat bukan di KPP lagi dan untuk kebijakannya semakin bertambah karena awal hanya ada parkir wanita dan toilet, sekarang sudah ada juga ruang laktasi, area merokok, tempat bermain anak dan loket khusus.

3. Dukungan sistem informasi yang ada di KPP Pratama Tanjung Karang sudah baik karena telah disosialisasikan secara eksternal dan maupun internal, data terpilah juga telah tersedia, pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi internal maupun eksternal juga telah tersampaikan.
4. Sumber daya manusia yang ada sudah mampu untuk melaksanakan pengarusutamaan gender. Pemahaman mereka terhadap PUG dapat meningkatkan kinerja terhadap pelaksanaan program.
5. Semua lapisan pegawai bersama-sama membantu pelaksanaan pengarusutamaan gender, untuk lebih spesifik terdapat di Subbagian Umum sebagai pengadaan dan Seksi Pelayanan sebagai fungsi penjagaan.
6. Kesadaran masyarakat yang masih rendah sehingga sosialisasi perlu dilakukan lagi oleh pihak kantor agar para wajib pajak mengetahui bahwa KPP Pratama Tanjung Karang telah menerapkan pengarusutamaan gender, dengan sosialisasi yang dilakukan melalui pendekatan kemasyarakatan diharapkan wajib pajak jadi lebih memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan.
7. Program yang ada di KPP Pratama Tanjung Karang telah responsif gender dan tidak hanya untuk pegawai namun juga untuk wajib pajak. Program yang dijalankan juga memperhatikan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di KPP Pratama Tanjung Karang sudah baik dilihat dari kebijakan, program, pemantauan dan pemenuhan fasilitas yang ada. Kekurangannya ada pada

fasilitas toilet yang tidak dibedakan, parkir wanita dan area merokok yang disediakan. Faktor pendukung terselenggaranya pengarusutamaan gender dapat dilihat dari dukungan politik, dukungan kebijakan, dukungan informasi, dukungan sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan. Dukungan tersebut dilakukan sehingga pengarusutamaan gender yang dilaksanakan sudah cukup baik, sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah, serta beberapa fasilitas yang kurang sesuai yaitu parkir wanita, area merokok dan toilet.

Saran

1. Program pengarusutamaan gender yang ada sudah cukup baik namun ada beberapa fasilitas yang sebaiknya dihilangkan seperti area merokok dan parkir wanita. Merokok yang bukan merupakan kebutuhan namun kebiasaan dan dilokasi parkir wanita telah disediakan petugas yang memarkirkan sehingga wanita tidak parkir sendiri. Selain itu toilet juga harus lebih diperhatikan agar dibedakan sesuai dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan.
2. Sosialisasi perlu ditingkatkan untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender yang ada di kantor.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Anjas Asmara (2016) Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) (Studi pada Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013)
- Demartoto, Argyo, 2009, *Kebutuhan Strategis Praktis Gender*, Surakarta, Sebelas Maret University Press
- Emzir, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persana

Administrativa | Vol 1 Nomor 1 Tahun 2019

- Fakih, Mansour, 2004, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Martono, Nanang, 2016, *Metode Penelitian Sosial : Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Mutiara Septiani Eka Putri (2018) *Implementasi Strategi Pengarusutamaan Gender melalui Program Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan di Provinsi Lampung*
- Partini, 2013, *Bias Gender dalam Demokrasi*, Yogyakarta, Tiara Wacana
- Rapar J.H, 2001, *Filsafat Politik*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Remiswal, 2013, *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Scott, John, 2013, *Sosiologi; The Key Concepts*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Sri Mastuti et .al., 2007, *Anggaran Responsif Gender*, Jakarta, Civic Education and Budget transparency Advocation (CiBa)
- Sugyiono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta
- Tresiana, Novita, (2015), *Perumusan Kebijakan Pendidikan yang Berspektif gender di Provinsi Lampung*, Jurnal Borneo Administrator Volume 11 No. 2
- Zainuddin M, Masyhuri, 2008, *Metodologi Penelitian*, Bandung, PT Refika Aditama

Dokumen

- Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
- Panduan Pelatihan Pengarusutamaan Gender Kementerian Keuangan